

Determinant of Internet Financial Reporting Disclosure

Devi Narulitasari¹ Rosalina Zafira²

¹UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta

²UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta

*devi.narulitasari@gmail.com

Abstract

So far, internet financial reporting is still a voluntary disclosure. This study aims to determine the effect of local government age, local government size, and audit opinion on internet financial reporting in Java. The population of this study is the Regency or City Government on the island of Java, Indonesia, which consists of 85 regencies and 34 cities. After using purposive sampling, a sample of 136 data was obtained, consisting of 52 regencies and 16 cities during the reporting period from 2018 to 2019. This type of research is quantitative research. The analytical tool used is by using logistic regression. The theory used in this research is Legitimacy theory and agency theory.

The results of this study indicate that the disclosure of Internet Financial Reporting to local governments on the island of Java is 43,38%. The local government age variabel has a significant positive effect on internet financial reporting, while the size of the local government has no significant effect on internet financial reporting, as well as audit opinion has no significant effect on internet financial reporting. It is hoped that local governments can improve internet financial reporting to provide sufficient and adequate financial information to the public. In addition, as a form of transparency and accountability for financial management and local government performance.

Keywords: Internet Financial Reporting, Regional Financial Reports, Age of Local Government, Size of Local Government, Audit Opinion.

Abstrak

Selama ini *internet financial reporting* masih menjadi *voluntary disclosure*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit terhadap *internet financial reporting* di Pulau Jawa. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Pulau Jawa, Indonesia yang terdiri dari 85 Kabupaten dan 34 Kota. Setelah dilakukan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* maka diperoleh sampel sebanyak 136 data, yang terdiri dari 52 Kabupaten dan 16 Kota selama periode pelaporan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan IFR pada pemerintah daerah di pulau Jawa sebesar 43,38%. Variabel umur pemerintahan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *internet financial reporting*, sedangkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*, begitu juga dengan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*. Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan *internet financial reporting* untuk meberikan informasi keuangan yang cukup dan memadai kepada masyarakat. selain itu juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: *Internet Financial Reporting*, Laporan Keuangan Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit.

1. Latar Belakang

Pemerintah mengeluarkan Kebijakan *e-Government* dalam Inpres Nomor 03 tahun 2003 dimana semua lembaga baik pusat atau daerah menginformasikan kekayaan daerahnya serta sebagai media layanan bagi masyarakat melalui *website* masing-masing agar dapat menuju *good governance*. Salah satu wujud *e-Government* adalah dengan *Internet Financial Reporting* (IFR) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang bersifat *voluntary disclosure*. (Nosihana & Yaya, 2016).

IFR belum banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Trisnawati & Achmad (2014) meneliti dari semua pemerintah daerah baru 13 persen yang mengungkapkan IFR. Verawaty (2015) menyatakan hal serupa, baru 37,93 persen pemerintah daerah yang mengungkapkan IFR. Pengungkapan IFR merupakan bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah daerah sehingga dapat menjadi kontrol masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan kebijakan yang diambil pemerintah daerah sehingga akan meminimalisir adanya KKN dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Karena tidak dapat dipungkiri masalah besar yang masih dihadapi negara kita adalah adanya tindak korupsi. Skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia di tahun 2020 adalah 37 dari 100 sehingga menempati urutan ke-102 dari 180 negara yang melakukan korupsi (Suyatmiko & Nicola, 2021).

Firli Bahuri pada 8 September 2021 menyampaikan bahwa dari tahun 2004 sampai tahun 2020 terdapat 26 pemerintah daerah yang melakukan tindak korupsi dari total 34 provinsi. Tindak korupsi pemerintah daerah tertinggi ada di pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat dengan jumlah kasus 101 (Kamil, 2021). Umur pemerintah daerah merupakan tahun berdirinya pemerintah daerah tersebut berdasarkan undang-undang (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Pemerintah daerah yang umurnya lebih lama memiliki pengalaman yang lebih dalam menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan (Naopal, dkk., 2017; Waliyyani & Mahmud, 2015; Simbolon & Kurniawan, 2018).

Aset pemerintah daerah yang besar akan mendapat perhatian yang lebih besar juga dari masyarakat karena khawatir terhadap pengelolaan dananya (Nosihana & Yaya, 2016). Dengan adanya aset yang besar maka pemerintah daerah mempunyai cukup dana untuk mendesain *website* yang dapat digunakan untuk mempublikasikan laporan keuangan (Ratmono, 2013). Pemerintah daerah yang mendapat opini WTP akan cenderung melakukan pengungkapan IFR, begitu juga sebaliknya yang tidak mendapatkan opini WTP akan menutupinya (Trisnawati & Achmad, 2014). Pemerintah daerah yang mendapat opini semakin baik akan semakin tinggi pengungkapannya (Naopal, dkk., 2017).

2. Landasan Teori

Pengembangan Hipotesis

2.1 Umur Pemda terhadap *Internet Financial Reporting*

Berdasarkan teori agensi pemerintah daerah berperan sebagai agen terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan prinsipal yaitu rakyat. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya dengan cara mengungkapkan laporan keuangan melalui *website* yang dimiliki pemda sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol dan melihat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Nainggolan & Purwanti, 2017; Waliyyani & Mahmud, 2015). Pemerintah daerah yang telah berdiri lebih lama akan mempunyai cukup pengalaman sehingga dapat melaporkan laporan keuangan lebih baik (Naopal, dkk., 2017). Begitu juga laporan keuangan internet yang sesuai dengan SAP (Simbolon & Kurniawan, 2018).

Berdasarkan penelitian (Naopal, dkk., 2017; Waliyyani & Mahmud, 2015; dan Setyaningrum & Syafitri, 2012) menyatakan bahwa umur Pemda memiliki pengaruh positif terhadap IFR. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Umur Pemda berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*.

2.2 Ukuran Pemda terhadap *Internet Financial Reporting*

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran lebih besar mempunyai alokasi biaya dan sumber daya manusia yang lebih mendukung untuk mengungkapkan IFR. Selain itu, semakin besar pemerintah daerah akan semakin banyak perhatian dari *stakeholder* sehingga berusaha memberikan informasi pengungkapan IFR yang semakin besar pula. Kinerja pemerintah yang baik sebagai agen dari masyarakat maka akan semakin baik pula dalam pemenuhan *good public governance* (Yustikasari, 2018). *Good public governance* dapat dilakukan melalui IFR.

Menurut penelitian (Pontoh, dkk., 2018; Nosihana & Yaya, 2016; Pratama, dkk., 2015; Trisnawati & Achmad, 2014; Puspita & Martani, 2012), ukuran Pemda memiliki pengaruh positif terhadap IFR. Oleh karena itu, maka dapat disusun hipotesis :

H2 : Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*.

2.3 Opini Audit terhadap *Internet Financial Reporting*

Semakin baik opini yang diperoleh oleh pemerintah daerah menunjukkan pengungkapan yang dilakukan juga memadai (Naopal, dkk., 2017), selain itu menunjukkan pengelolaan keuangan dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang semakin baik pula. Hal ini akan mendorong pengungkapan IFR yang semakin tinggi (Ratmono, 2013). Hal tersebut merupakan salah satu wujud untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Berdasarkan penelitian (Sofyani & Dwirama, 2019; Nor, dkk., 2019; Pontok dkk., 2018; dan Naopal, dkk., 2017) opini audit berpengaruh positif terhadap IFR. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis yakni:

H3 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi 119 kabupaten / kota di Pulau Jawa, yang terdiri dari 85 Kabupaten dan 34 Kota. Populasi merupakan kelompok manusia, peristiwa, atau hal unik yang menjadi objek penelitian (Sekaran & Bougie, 2013). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Pada teknik tersebut sampel yang diperoleh memuat informasi yang diperlukan oleh peneliti dengan ketentuan yang telah dibuat (Sekaran & Bougie, 2013). Kriteria yang digunakan adalah kabupaten/kota yang memuat laporan keuangan yang dapat diakses pada website pemerintah daerah pada tahun penelitian 2018-2019. Komponen kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sampel yang diteliti sejumlah 68 pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu dua tahun sehingga totalnya 136 sampel. Sampel pada penelitian ini terdiri dari :

Tabel 1. Kabupaten/ Kota Sampel Penelitian

NO	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Bogor	24.	Kabupaten Kendal	47.	Kab. Kulon Progo
2.	Kab. Bandung	25.	2Kabupaten Klaten	48.	Kab. Bantul
3.	Kab. Garut	26.	Kabupaten Kudus	49.	Kab. Sleman
4.	Kab. Tasikmalaya	27.	Kabupaten Magelang	50.	Kab. Pacitan
5.	Kab. Majalengka	28.	Kabupaten Pati	51.	Kab. Ponorogo
6.	Kab. Indramayu	29.	Kabupaten Pekalongan	52.	Kab. Trenggalek
7.	Kab. Subang	30.	Kabupaten Purbalingga	53.	Kab. Lumajang
8.	Kab. Purwakarta	31.	Kabupaten Purworejo	54.	Kab. Situbondo
9.	Kab. Karawang	32.	Kabupaten Rembang	55.	Kab. Sidoarjo
10.	Kota Bogor	33.	Kabupaten Semarang	56.	Kab. Jombang
11.	Kota Bandung	34.	Kabupaten Sragen	57.	Kab. Ngawi
12.	Kota Bekasi	35.	Kabupaten Sukoharjo	58.	Kab. Bojonegoro
13.	Kota Cimahi	36.	3Kabupaten Tegal	59.	Kab. Tuban
14.	Kabupaten Banyumas	37.	Kabupaten Temanggung	60.	Kab. Pamekasan
15.	Kabupaten Batang	38.	Kabupaten Wonogiri	61.	Kota Malang
16.	Kabupaten Blora	39.	Kabupaten Wonosobo	62.	Kota Probolinggo
17.	Kabupaten Boyolali	40.	Kabupaten Banjarnegara	63.	Kota Mojokerto
18.	Kabupaten Brebes	41.	Kota Magelang	64.	Kota Surabaya
19.	Kabupaten Cilacap	42.	Kota Pekalongan	65.	Kab. Pandeglang
20.	Kabupaten Demak	43.	Kota Salatiga	66.	Kab. Tangerang
21.	Kabupaten Grobogan	44.	Kota Semarang	67.	Kota Tangerang
22.	Kabupaten Jepara	45.	Kota Surakarta	68.	Kota Tangerang Selatan
23.	Kabupaten Kebumen	46.	Kota Tegal		

Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa; *website* Kemendagri; *website* DPR-Ri; *website* BPK Provinsi di Pulau Jawa; surat kabar; artikel; buku dan lain sebagainya yang dapat mendukung penelitian.

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan software SPSS 23 dengan alat analisis regresi logistik. Persamaan dasar penelitian ini adalah :

$$\text{DIFR} = \alpha + \beta_1 \text{Age} + \beta_2 \text{LnSize} + \beta_3 \text{DAudit} + e$$

Keterangan :

IFR = *Internet Financial Reporting*

α = Konstanta

D = *Dummy*

Ln = Logaritma Natural

β = Koefisien Regresi

Age = Umur Pemda

Size = Ukuran Pemda

Audit = Opini Audit

e = *error*

Definisi Operasional Variabel

1. Internet Financial Reporting

Internet financial reporting adalah pengungkapan laporan keuangan di website resmi pemerintahan daerah yang bersifat *voluntary* (Nosihana & Yaya, 2016). Item laporan keuangan yang diteliti didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu berupa Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Apabila pemerintah daerah melaporkan laporan tersebut di website secara lengkap maka diberi nilai 1, jika tidak melaporkan laporan keuangan secara tidak lengkap atau tidak melaporkan maka akan diberi nilai 0 (Alhajjriana, dkk., 2017).

2. Umur Pemda

Umur pemerintah daerah menunjukkan eksistensi dan bukti keberadaan serta keberlangsungan pemerintah daerah tersebut (Suhardjanto dkk., 2010). Umur pemerintah daerah merupakan umur berdirinya pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Variabel ini diukur dengan mencari tahun penelitian dikurangi tahun dibentuknya pemerintah daerah (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

3. Ukuran Pemda

Ukuran Pemerintah daerah merupakan total aset yang menjadi tanggung jawab dan dimiliki oleh pemda (Yustikasari, 2018). Variabel ini diukur dengan Ln Total Aset (Naopal, dkk., 2017). Pertimbangan menggunakan pengukuran ini karena total aset merupakan ukuran yang relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan ukuran lain (Sudarmadji & Sularto, 2007)

4. Opini Audit

Opini Audit merupakan pernyataan hasil audit yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan berdasarkan norma dan aturan dengan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Tobing, 2004). Variabel ini diukur dengan memberikan nilai 1 pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan memberikan nilai 0 pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini selain WTP (Nosihana & Yaya, 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Tabel 2. Internet Financial Reporting

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	77	56.6	56.6	56.6
1	59	43.4	43.4	100.0
Total	136	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di website yang lengkap sebesar 59 dengan persentase 43,4 % sedangkan pemerintah daerah yang tidak melakukan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap atau tidak mengungkapkan laporan keuangan sebanyak 77 pemerintah daerah dan mempunyai persentase 56,6 %.

Tabel 3. Umur Pemda

Age	Frequency	Percent
10 – 29	18	13.24
30 – 49	6	4.41
50 – 69	112	82.35

Berdasarkan tabel di atas pemerintah daerah yang berumur antara 10-29 tahun berjumlah 18 dengan persentase 13,24%. Pemerintah daerah yang berumur antara 30-49 tahun sebanyak 6 dengan persentase 4,41%. Sedangkan pemerintah daerah yang berumur antara 50-69 tahun sebanyak 112 dengan persentase 82,35%.

Tabel 4. Opini Audit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Opini non WTP	2	1.5	1.5	1.5
	Opini WTP	134	98.5	98.5	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

Menurut tabel di atas pemerintah daerah yang memperoleh opini non WTP sebanyak 2 dengan persentase 1,5%, sedangkan yang memperoleh opini WTP sebanyak 134 dengan persentase 98,5%.

Uji Kelayakan Model Regresi

Pengujian kelayakan model yang digunakan adalah dengan *Hosmer and Lemeshow Test*.

Tabel 5. Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.299	8	.614

Nilai signifikansi pada tabel *Hosmer and Lemeshow Test* adalah 0,614 dimana lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 sehingga model dapat diterima sesuai dengan data observasinya.

Tabel 6. Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	9.492	3	.023
	Block	9.492	3	.023
	Model	9.492	3	.023

Pengujian Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*) yang digunakan dengan menggunakan *Omnibus Test of Model Coefficient* untuk menilai secara serentak variabel independen terhadap variabel dependennya. Apabila nilai p-value < 0,05 maka model

dikatakan fit. Pada tabel di atas nilai p-value sebesar 0,023 sehingga < 0,05 maka model dapat dikatakan fit.

Tabel 7. Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	176.654 ^a	.067	.090

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Nilai *Nagelkerke R Square* di atas 9%, ini berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 9% dimana 91% lainnya tidak diterangkan dalam penelitian ini.

Tabel 8. Classification Table^a

Observed	Predicted		Percentage Correct
	IFR 0	IFR 1	
IFR 0	64	13	83.1
IFR 1	41	18	30.5
Overall Percentage			60.3

a. The cut value is ,500

Tabel di atas memperlihatkan nilai kekuatan prediksi pemerintah daerah yang tidak melakukan pengungkapan IFR sebesar 83,1% sedangkan nilai kekuatan prediksi pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan IFR sebesar 30,5%. Sehingga total keseluruhan model ini dapat menilai prediksi IFR pada pemerintah daerah sebesar 60,3%.

Uji Regresi Logistik

Tabel 9. Uji regresi Logistik

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a LnSize	.323	.215	2.249	1	.134	1.381	.906	2.107
Audit	21.109	28410.404	.000	1	.999	1470822436.704	.000	.
Age	.028	.013	5.133	1	.023	1.029	1.004	1.054
Constant	-32.515	28410.404	.000	1	.999	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: LnSize, Audit, Age.

Berdasarkan hasil uji regresi logistik maka dapat disusun persamaan regresinya adalah :

$$DIFR = \alpha + \beta_1 \text{ Age} + \beta_2 \text{ LnSize} + \beta_3 \text{ DAudit} + e$$

$$= -32,515 + 0,028\text{Age} + 0,323\text{LnSize} + 21,109\text{DAudit} + 0,91$$

3.2. Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Umur Pemda Terhadap *Internet Financial Reporting*

Berdasarkan hasil uji statistik, nilai signifikansi umur pemerintah daerah (0,023) lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama pemerintah daerah berdiri maka akan lebih baik dalam pengungkapan IFRnya. Pemerintah daerah yang lama berdiri mempunyai pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dalam melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP (Simbolon & Kurniawan, 2018). Termasuk dalam pengungkapan yang lebih baik (Waliyyani & Mahmud, 2015).

Pemerintah daerah berperan sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai pincipil. Salah satu cara untuk menunjukkan kinerjanya dengan menyajikan laporan keuangan melalui internet di website masing-masing pemda. Selain itu juga dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan yang selama ini mereka lakukan, apakah sama atau terjadi peningkatan (Nainggolan & Purwanti, 2017).

Pemerintah daerah yang berumur lebih dari 50 tahun berjumlah 112. Dari jumlah tersebut yang melakukan publikasi IFR secara lengkap di websitenya berjumlah 53 pemerintah daerah. Sedangkan, untuk pemerintah daerah yang umurnya kurang dari 50 tahun berjumlah 24 pemerintah daerah dan hanya 6 pemerintah daerah yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap di internet. Data tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah yang berumur lebih tua akan lebih banyak melakukan pengungkapan IFR.

Penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian (Naopal, dkk., 2017; Waliyyani & Mahmud, 2015; dan Setyaningrum & Syafitri, 2012) namun tidak sejalan dengan penelitian (Simbolon & Kurniawan, 2018).

3.2.2 Pengaruh Ukuran Pemda Terhadap *Internet Financial Reporting*

Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa hipotesis ke-2 ditolak yaitu ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting*. Karena nilai signifikansi ukuran Pemda (0,134) lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang besar bukan merupakan jaminan untuk pemerintah daerah tersebut dalam mempublikasikan laporan keuangannya melalui websitenya.

Berbeda dengan teori yang mendasari penelitian, dimana pemerintah yang mempunyai ukuran besar mempunyai alokasi biaya dan SDM yang cukup untuk melakukan pengungkapan IFR. Selain juga akan semakin besar perhatian para stakeholder, sehingga pemerintah daerah akan berusaha memberikan informasi keuangan melalui IFR di websitenya.

Hal ini dapat terjadi karena ukuran pemerintah daerah belum cukup untuk memotivasi dalam pengungkapan IFR. Termasuk alokasi biaya dan SDM yang dimiliki mungkin dialokasikan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, aset pemerintah daerah terbesar pada tahun 2019 dimiliki oleh kota Surabaya sebanyak 44 triliun per tahun, namun pemerintah daerah kota Surabaya tidak melakukan pengungkapan IFR di website mereka. Sedangkan pemerintah daerah yang memiliki total aset kecil pada

tahun 2019 yaitu kota Probolinggo dengan total aset sebesar 1,68 triliun per tahun melakukan pengungkapan IFR di website mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Masra & Sari, 2020; Yutikasari, 2018; dan Setyaningrum dan Safitri, 2012) namun tidak sejalan dengan penelitian (Pontoh, dkk., 2018; Nosihana & Yaya, 2016; Pratama, dkk., 2015; Trisnawati & Achmad, 2014; Puspita & Martani, 2012).

3.2.3 Pengaruh Opini Audit Terhadap *Internet Financial Reporting*

Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa hipotesis ke-3 ditolak yaitu opini audit tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting*. Karena nilai signifikansi ukuran Pemda (0,999) lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh opini audit WTP atau non WTP dalam melakukan publikasi laporan keuangan pada website mereka.

Semakin baik opini yang diperoleh oleh pemerintah daerah maka akan menunjukkan pengungkapan yang dilakukan juga memadai (Naopal, dkk., 2017), selain itu menunjukkan pengelolaan keuangan dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang semakin baik pula. Hal ini akan mendorong pengungkapan IFR yang semakin tinggi (Ratmono, 2013). Hal tersebut merupakan salah satu wujud untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Namun hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis tersebut, karena pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP tidak serta merta selalu mempublikasikan laporan keuangannya pada website mereka. Banyak faktor lain seperti SDM, program pada website, ketersediaan akses internet dan hal lainnya yang mempengaruhi untuk melakukan publikasi laporan keuangan di internet.

Berdasarkan data penelitian pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP sejumlah 134 pemda, namun dari jumlah tersebut baru 44,03% yang mempublikasikan laporan keuangan pada website mereka. Sedangkan sisanya 55,97% meskipun mendapatkan opini WTP namun tidak mempublikasikan laporan keuangannya di website mereka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kurniawan & Scopianti, 2019; Idris, dkk., 2018; Prabowo, 2016; Nosihona & Yaya, 2016; dan Trisnawati & Achmad, 2014) namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Sofyani & Dwirama, 2019; Nor dkk., 2019; Pontoh dkk., 2018; dan Naopal, 2017)

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dari 136 sampel pemerintah daerah kabupaten atau kota di pulau Jawa baru terdapat 59 pemerintah daerah atau 43,38% yang melakukan IFR. Variabel umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Sehingga semakin lama pemerintah daerah tersebut berdiri maka pengungkapan IFRnya akan semakin bagus. Sedangkan ukuran pemerintah daerah dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengungkapan IFR pada website resmi mereka untuk memberikan informasi keuangan yang cukup dan memadai kepada masyarakat selain itu juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang mendukung terciptanya penelitian ini. Termasuk para peneliti terdahulu yang memberikan referensi dan paradigma pemikiran sehingga terwujudnya penelitian ini. Kami sadar bahwa hasil riset kami jauh dari sempurna, sehingga saran dan masukan sangat kami butuhkan. Selain itu penelitian ini juga perlu dikembangkan lebih lanjut dengan objek yang lebih luas dan waktu pengamatan yang lebih panjang agar hasilnya dapat digeneralisir lebih tepat lagi.

Referensi

- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 17. No. 2. 100-109.
- Idris, A. L. M., Surasni, N. K., & Irwan, M. (2018). The Determinant Disclosure of Internet Financial Reporting in District and City Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Research*, 9(1), 62–74.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Jatengprov. Website Kab/Kota - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. <https://jatengprov.go.id/website-kab-kota/>. Diakses 12 November 2021.
- Kamil, Irfan (2021) Ketua KPK: Jawa Barat Peringkat Satu dengan 101 Kasus Korupsi Daerah, *Kompas*, 8 September 2021
- Kurniawan, C. H., & Scorpianti, L. N. K. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal MODUS Fakultas Ekonomi UAJY* Vol. 31 (2): 184-206.
- Masra, E. A., & Sari, V. F. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 2. No. (2). 2757–2771.
- Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website*, 1(6), 1–26.
- Naopal, F., Rahayu, S., Yudowati, & Priyandani, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Assets*. Vol. 7. No. (1). 56–68.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research*. Vol. 4. No. 1. 112–128.

- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 3(2), 87–101.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI.
- Pontoh, G. T., Rura, Y., Rahman, A., & Ibrahim, M. A. (2018). Internet Financial Reporting of Public Institutions and E-Government as a Medium of Good Governance in Indonesia. *Journal of Finance & Banking Review (JFBR)*, 3(3), 28–33.
- Prabowo, D. W. A. (2016). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD114) Melalui Internet (IFLGR) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis MEDIA EKONOMI*, XVI No. 1(1), 1689–1699.
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 3(1), 12.
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. *Simposium Nasional Akuntansi*. Vol. 15.
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. In *Media Ilmiah Akuntansi*. Vol. 1. No. 2.
- Sekaran & Bougi. (2013). *Edisi 5, Research Methods for Business: A skill Building Approach*. New York: John wiley@Sons.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Modus*, 30(1), 54–70.
- Sofyani, H., & Dwirama, V. (2019). Determinan praktik internet reporting oleh pemerintah daerah di Indonesia. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVII(2), 158–168.
- Sudarmadji dan Sularto. 2007. *Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan type kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary disclosure laporan keuangan tahunan*. Proceeding Pesat 2.

- Suhardjanto, D., Putriesti M., Rusmin, dan Alistair, B. 2010. Mandatory disclosure compliance and local government characteristics: evidence from Indonesia municipalities. Hibah penelitian publikasi internasional LP2M UNS.
- Suyatmiko, W & Nicola, A. (2021). Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi. *Transparency International Indonesia*. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>. Diakses tanggal 19 November 2021
- Trisnawati, M. ., & Achmad, K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram, Lombok*. Vol. 2.
- Tobing Riduan dan Nirwana. 2004. *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: Atalya Rileni Sucedo. No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Verawaty. (2015). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara*.
- Waliyyani, G. M. dan Mahmud, A. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Vol.4. No.3. 1-8.
- Yustikasari, Y. (2018). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kompleksitas Pemerintahan, Dan Tingkat Kesejahteraan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada website Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se – Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol. 11. No. (1). 34–52.

Lampiran

1. Output Uji Overall Model Fit

Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
Step 0 1	186.147	-.265
2	186.147	-.266
3	186.147	-.266

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 186,147
- c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients			
		Constant	LnSize	Audit	Age
Step 1 1	177.263	-11.957	.284	1.911	.025
2	176.825	-14.401	.322	3.041	.028
3	176.715	-15.490	.323	4.085	.028
4	176.676	-16.506	.323	5.100	.028
5	176.662	-17.511	.323	6.106	.028
6	176.657	-18.513	.323	7.108	.028
7	176.655	-19.514	.323	8.109	.028
8	176.655	-20.514	.323	9.109	.028
9	176.654	-21.514	.323	10.109	.028
10	176.654	-22.515	.323	11.109	.028
11	176.654	-23.515	.323	12.109	.028
12	176.654	-24.515	.323	13.109	.028
13	176.654	-25.515	.323	14.109	.028
14	176.654	-26.515	.323	15.109	.028
15	176.654	-27.515	.323	16.109	.028
16	176.654	-28.515	.323	17.109	.028
17	176.654	-29.515	.323	18.109	.028
18	176.654	-30.515	.323	19.109	.028
19	176.654	-31.515	.323	20.109	.028
20	176.654	-32.515	.323	21.109	.028

- a. Method: Enter
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 186,147
- d. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.